



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IYOS SOMANTRI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 87987

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.669.000.000**

1. Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/220 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 253.000.000
4. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 99.000.000
5. Tanah Seluas 1340 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL
SENDIRI Rp. 402.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 18.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 82.100.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 6.250.785.136****F. HARTA LAINNYA****Rp. 241.781.000****Sub Total****Rp. 8.261.666.136**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.261.666.136

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.